

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Layaknya seorang manusia yang selalu mengalami perkembangan baik fisik ataupun mental secara bertahap, masyarakat sebagai gabungan dari individu-individu yang membentuk suatu kelompok juga mengalami perubahan demi perubahan seiring berjalannya waktu. Perkembangan yang terjadi dalam masyarakat merupakan bagian dari perubahan sosial. Perubahan dan perkembangan masyarakat tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan terdapat faktor-faktor yang menjadi penyebab akibat dari interaksi dan aktivitas masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat berlangsung secara cepat, terjadi secara tiba-tiba tanpa dikehendaki. Bisa juga berlangsung secara perlahan tanpa disadari oleh masyarakat.

Tahun 1998 Indonesia memasuki babak baru yang disebut dengan era reformasi. Dimana era ini ditandai dengan digulingkannya kepemimpinan Presiden kedua Indonesia kala itu yaitu Soeharto. Era reformasi mengubah tatanan sistem Pemerintahan dari Sentralistik menuju Desentralistik, dari pemerintahan yang terpusat kemudian diserahkan kepada masing-masing tiap daerah, atau saat ini lebih dikenal dengan Otonomi Daerah. Otonomi Daerah diatur dalam UU Nomor 23 Tentang Pemerintah Daerah.

Menurut Undang- undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Kemudian, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 2 pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal- usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Sehingga, selain menyerahkan otonomi daerah pada tingkatan Pemerinah Daerah, Desa sebagai instrument terkecil dalam negara juga berwenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi landasan bagi desa untuk menjalankan roda pemerintahannya. Pasca disahkannya UU tersebut, pembentukan desa-desa baru di penjuru pelosok Indonesia semakin bertambah pesat. Menurut data Kementerian Dalam Negeri Per 29 Juni 2016, jumlah desa yang sebelumnya pada tahun 2015 berjumlah 74.093, bertambah sebanyak 661 desa, dan di tahun 2016 jumlah desa di Indonesia mencapai 74.754. Salah satu

Desa yang mengalami pembentukan menjadi desa baru adalah Kampung Warmon Kokoda tepatnya di Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Istilah penyebutan kampung di Papua adalah desa, dan distrik adalah kecamatan.

Kampung Warmon Kokoda merupakan sebuah desa yang dihuni oleh masyarakat asli Papua dengan kelompok yang disebut dengan Suku Kokoda. Masyarakat Suku Kokoda merupakan masyarakat asli Papua yang berasal dari salah satu daerah di Kabupaten Sorong Selatan, tepatnya di Kampung Siwatori, Distrik Kokoda. Istilah tuan tanah dalam hal kepemilikan atas suatu wilayah masih sangat kental di Papua, sehingga meskipun sama-sama asli orang Papua, masyarakat Suku Kokoda tetap saja tak beda seperti halnya para transmigran Jawa lainnya yang disebut suku pendatang. Sebab tuan tanah di wilayah Kabupaten Sorong adalah Suku Moi.

Jauh sebelum terbentuk menjadi Kampung/Desa secara definitif masyarakat Warmon Kokoda adalah masyarakat yang nomaden, berpindah-pindah tempat di sekitar wilayah Kabupaten dan Kota Sorong. Pemukiman Masyarakat Kokoda sendiri tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten dan Kota Sorong. Di wilayah Kabupaten dapat dijumpai di Kampung Sagu, perkampungan Usili, Korwato, Klalin, dan di Kampung Warmon Kokoda. Kemudian di wilayah Kota dapat dijumpai di Kilo 9, Rufei Surya, serta dahulunya di sekitar Bandara. Masyarakat Kokoda di Kampung Warmon Kokoda masih ada keterikatan yang sangat kuat dengan masyarakat Kokoda di daerah kota yaitu di Rufei Surya, dimana mereka sama-sama berasal dari kampung asal yang sama yaitu Siwatori dan juga dahulunya mereka tinggal bersama di Rufei Surya.

Masyarakat Warmon Kokoda adalah masyarakat yang masih menggantungkan hidupnya pada hasil hutan, atau bisa dikatakan hidup pada fase berburu dan meramu. Cara hidup serta kebiasaan mereka, kerap menjadi masalah bagi masyarakat transmigran Jawa. Karena tak jarang hasil kebun dari masyarakat transmigran, yang memanen adalah masyarakat Warmon Kokoda. Anggapan mereka bahwa apa yang tumbuh diatas tanah yang dipijak adalah karunia Tuhan yang bisa dimanfaatkan oleh tiap insan. Hal inilah yang sering memicu munculnya konflik antara masyarakat Warmon Kokoda dan Transmigran Jawa. Stigma negatif dan sentimen oleh masyarakat transmigran terhadap masyarakat kokoda hingga kini masih menjadi hal yang sulit untuk membuat keduanya hidup secara akur dan gotong royong. Pendapat bahwasannya masyarakat kokoda adalah masyarakat pencuri, pemalas, serta tidak pernah berubah, masih menjadi jurang pemisah diantara keduanya untuk melakukan dialog-dialog serta hubungan komunikasi yang baik. Meskipun seiring berjalannya waktu intensitas interaksi diantara keduanya semakin meningkat, namun stigma negatif itu hingga sekarang masih mengakar.

Hal inilah salah satu yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian ini. Bahwa, dalam 4 tahun terakhir pasca pembentukan desa, masyarakat Warmon Kokoda sebenarnya telah mengalami perubahan-perubahan meskipun perubahan itu terjadi secara tidak signifikan.

Tahun 2002 menjadi awal dimana masyarakat Warmon Kokoda menempati wilayah yang saat ini menjadi tempat hidup bagi kelompok masyarakat tersebut. Sebelum terbentuk menjadi desa, secara administratif

Warmon Kokoda dahulunya masuk dalam wilayah Kelurahan Makbusun yang berdampingan langsung dengan masyarakat transmigran Jawa dalam satu kelurahan. Kemudian pada akhir tahun 2015, dengan pendampingan MPM (Majelis Pemberdayaan Masyarakat) Muhammadiyah Warmon Kokoda resmi menjadi entitas yang berdiri sendiri sebagai suatu Kampung (Desa) yang diakui dan disahkan oleh negara.

Soemardjan dalam (Soekanto, 1999) mengatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Disahkannya Kampung Warmon sebagai desa definitif tentunya membawa pengaruh besar dalam tatanan hidup masyarakat Warmon Kokoda, dari yang awalnya hanya komunitas masyarakat adat yang tinggal di suatu wilayah, kemudian ditetapkan secara legal formal menjadi sebuah desa. Keberadaan Kepala Desa sebagai pemimpin masyarakat serta perangkat-perangkat desa yang membantunya menciptakan sistem kelembagaan baru yang juga ikut hadir dalam struktur sosial masyarakat. Dimana pada sebelumnya seorang raja menjadi sosok yang dihormati dan dianggap sebagai pemimpin oleh masyarakat di Kampung Warmon Kokoda.

Melalui latar belakang ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Perubahan Sosial Masyarakat Desa Warmon Kokoda Pasca Pembentukan Desa**. (Studi Kasus: Desa Warmon Kokoda, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Papua Barat).

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana Perubahan Sosial Masyarakat Desa Warmon Kokoda Pasca Pembentukan Desa?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

Menjelaskan Perubahan Sosial Masyarakat Desa Warmon Kokoda Pasca Pembentukan Desa

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir dan penulis melalui karya ilmiah. Serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru tentang kehidupan sosial Masyarakat Kampung Warmon Kokoda pasca pembentukan desa.

b. Manfaat Praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan energi baru bagi masyarakat kampung Warmon Kokoda menuju perubahan sosial masyarakat kearah yang positif dengan mengusung semangat gotong royong.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian, penulis marangkum beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan perubahan-perubahan sosial masyarakat. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu. Tinjauan pustaka digunakan untuk petunjuk, pembanding, dan penunjang dalam penelitian ini. Diantaranya adalah:

Penelitian yang dilakukan oleh Nensy Lusida, penulis menggunakan tulisan Nensy Lusida (2017) sebagai tinjauan pustaka karena penelitian ini merupakan salah satu penelitian yang mengkaji tentang Masyarakat Desa Warmon Kokoda. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana proses pembentukan desa serta peran Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Muhammadiyah dalam pembentukan dan penguatan pemerintah desa. Hasil dari penelitian ini adalah MPM berperan sebagai inisiator, fasilitator dan memotivasi masyarakat Desa Warmon Kokoda untuk meningkatkan potensi baik SDM dan SDA serta mendorong masyarakat untuk menjadi masyarakat yang mandiri.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizki Ramada (2018) yang mengkaji tentang stereotip masyarakat transmigran Jawa kepada masyarakat Kokoda. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa terdapat stereotip dari masyarakat transmigran Jawa yaitu masyarakat Suku Kokoda adalah pemalas, pencuri, kotor, keras kepala dan tidak tahu sopan santun. Stereotip tersebut terbentuk dari adanya perbedaan kepercayaan, pola hidup dan perilaku antara kelompok masyarakat

yang memiliki kebiasaan berkebun dan masyarakat nomaden yang terbiasa hidup berburu dan meramu.

Penelitian yang dilakukan oleh Cholifah dan Harianto (2017). Penelitian ini menemukan: pertama, dimensi struktural di antaranya, pendidikan, perubahan status dan peran, munculnya stratifikasi sosial, dan kesetaraan gender. Kedua, dimensi kultural di antaranya, gaya hidup meningkat, memudarnya modal budaya dan modal sosial, dan munculnya penyimpangan sosial. Ketiga, dimensi interaksional di antaranya, media berinteraksi berubah, perbedaan literasi teknologi, dan penggunaan bahasa. Perubahan sosial disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu SMP Satu Atap, konflik, dan munculnya stratifikasi sosial. Faktor eksternalnya yaitu pengaruh budaya asing, aturan pemerintah, internet, masyarakat pendatang, masyarakat yang bekerja dan sekolah diluar kota. Saluran perubahan sosial yaitu: pemerintah, ekonomi, teknologi, agama, dan pendidikan. Dampak positifnya adalah pendidikan meningkat, perekonomian meningkat, kesetaraan gender, gaya hidup lebih baik, modernisasi pertanian, dan pola pikir lebih logis, rasional, terbuka. Dampak negatifnya adalah penyimpangan sosial, tenaga kerja produktif berkurang, munculnya stratifikasi sosial, terjadinya disintegrasi sosial, dan memudarnya modal sosial dan modal budaya.

Penelitian yang dilakukan oleh Triwijaya (2017) yang mengkaji tentang perubahan sosial masyarakat perumahan bertingkat yang berlokasi di Depok, Kabupaten Sleman. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa hadirnya rumah susun dan apartemen telah menimbulkan pola perilaku dan dinamika sosial yang

baru bagi masyarakat. Menurunnya interaksi sosial berimbas pada nilai dan norma tidak berjalan.. Sehingga kebudayaan yang selama ini menjadi patron masyarakat menjadi luntur. Hal itu terjadi karena adanya kedatangan budaya baru yang hinggap, minimnya interaksi antara penghuni dan masyarakat, dan masalah-masalah sosial dan lingkungan akibat adanya produksi.

Penelitian yang dilakukan oleh Lumintang (2015). Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh perubahan sosial terhadap kemajuan pembangunan masyarakat di Desa Tara-Tara. Adapun hasilnya adalah bahwa pelaksanaan pembangunan di desa membuat perubahan yang sangat menguntungkan, karena sebagian besar masyarakat mengalami perbaikan atau perubahan tingkat hidup dan penghidupannya, dan yang menyatakan tidak terjadi perubahan karena mereka tidak mau berusaha apatis terhadap pembangunan.

Penelitian yang dilakukan oleh Gunawan dkk (2015) tentang perubahan sosial budaya masyarakat desa Cihideung sebagai desa wisata. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa ada beberapa perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, perubahan yang terjadi adalah perubahan dari masyarakat pertanian mengarah pada masyarakat desa yang mengandalkan pariwisata.

Penelitian yang dilakukan oleh Bastanta Sitepu dkk (2018) tentang perubahan sosial budaya muda mudi Sirulo Bali pada etnik Batak Karo di Kota Denpasar. Adapun hasil penelitiannya adalah bahwa muda-mudi Sirulo Bali telah mengalami perubahan, ada yang mengarah ke positif ada yang mengarah ke negatif. Positifnya mereka mulai banyak yang melestarikan dan menegakkan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat Karo. Dan negatifnya, dapat dilihat dari

gaya hidup, pengaruh teknologi dan kurangnya rasa saling menghormati antar anggota.

Dari tinjauan pustaka diatas penulis mencoba menggunakannya sebagai petunjuk, pembanding serta penunjang dalam melakukan penelitian ini. Dimana tinjauan pustaka tentang masyarakat Desa Warmon Kokoda akan dijadikan penulis sebagai data penunjang dan penelitian tentang perubahan sosial akan dijadikan penulis sebagai petunjuk dan pembanding dalam melakukan penelitian. Pada penelitian ini perubahan penulis mencoba meneliti tentang perubahan sosial pasca pembentukan desa yang belum dikaji pada penelitian-penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teori

1. Perubahan Sosial

a. Definisi Perubahan Sosial

Perubahan merupakan proses yang tak pernah berhenti dalam dalam siklus hidup manusia, baik berdiri sebagai individu atau sebagai kelompok. Perubahan-perubahan pada masyarakat dapat berupa perubahan norma-norma sosial, nilai-nilai sosial, pola-pola perilaku dalam organisasi, susunan lembaga yang ada dalam sistem kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, interaksi sosial, kekuasaan dan wewenang dalam masyarakat serta perubahan-perubahan yang lainnya (Soekanto, 1999:333).

Menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, perubahan sosial merupakan segala bentuk perubahan-perubahan dalam lembaga-

lembaga kemasyarakatan pada suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk dalam nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat (Soekanto, 1999:337).

Sementara menurut John Lewis Gillin dan John Philip Gillin dalam (Martono, 2012: 4), perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara hidup yang diterima, akibat adanya perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi dan penemuan baru dalam masyarakat.

b. Dimensi Perubahan Sosial

Menurut Himes dan Moore (dalam Soelaiman, 1998) perubahan sosial dibagi menjadi beberapa dimensi, yaitu :

- 1) **Dimensi Struktural**, Dimensi struktural, mengacu pada perubahan perubahan dalam bentuk struktur masyarakat, menyangkut peranan, munculnya peranan baru, perubahan dalam kelas sosial, dan perubahan dalam lembaga sosial. Perubahan tersebut meliputi: bertambah dan berkurangnya kadar peranan, menyangkut aspek perilaku dan kekuasaan, adanya peningkatan atau penurunan sejumlah peranan atau pengkategorisasian peranan, terjadinya modifikasi saluarn komunikasi diantara peranan-peranan atau kategori peranan, dan terjadinya perubahan dari sejumlah tipe dan daya guna fungsi sebagai akibat dari struktur. Dalam melakukan peranan tertentu, individu yang merupakan bagian dari struktur masyarakat dapat mengembangkan nilai integritas

dengan memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai kemanusiaan, serta mempunyai konsistensi tindakan dan perkataan yang berdasarkan kebenaran.

2) **Dimensi Kultural**, mengacu pada perubahan kebudayaan dalam masyarakat. Perubahan ini meliputi:

a) Inovasi kebudayaan. Inovasi kebudayaan merupakan komponen internal yang memunculkan perubahan sosial dalam suatu masyarakat. Inovasi kebudayaan yang paling mudah ditemukan adanya teknologi baru. Kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks memaksa individu untuk berfikir kreatif dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Adanya teknologi baru dapat dimanfaatkan untuk kebaikan hidup bersama sehingga mengembangkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai religius utamanya anti buli dan kekerasan. Teknologi baru digunakan untuk kemudahan kehidupan bersama seperti menyampaikan informasi yang berhubungan dengan menolong korban bencana alam di daerahnya, memberi informasi tentang keberhasilan masyarakat, tidak menyebarkan gosip apalagi fitnah terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu sehingga menimbulkan keresahan kehidupan sosial.

b) Difusi, merupakan komponen eksternal yang mampu menggerakkan terjadinya perubahan sosial. Sebuah kebudayaan mendapat pengaruh dari budaya lain, yang kemudian memicu terjadinya

perubahan kebudayaan dalam masyarakat yang mau menerima unsur-unsur kebudayaan tersebut.

c) Integrasi, merupakan wujud perubahan budaya yang relatif lebih halus. Hal ini disebabkan dalam proses ini terjadi penyatuan unsur-unsur kebudayaan yang saling bertemu untuk kemudian memunculkan kebudayaan baru sebagai hasil penyatuan berbagai unsur-unsur budaya tersebut.

3) **Dimensi Interaksional:** mengacu pada adanya perubahan hubungan sosial dalam masyarakat . Dimensi ini meliputi:

a) Perubahan dalam frekuensi. Perkembangan teknologi telah menyebabkan berkurangnya frekuensi individu untuk saling bertatap muka, karena semua kebutuhan dipenuhi dengan menggunakan teknologi.

b) Perubahan dalam jarak sosial, perubahan teknologi informasi telah menggeser fungsi tatap muka dalam proses interaksi. Individu tidak harus tatap muka dalam melakukan komunikasi dan interaksi secara langsung.

c) Perubahan perantara, mekanisme kerja individu dalam masyarakat modern banyak bersifat serba online menyebabkan individu tidak membutuhkan orang lain dalam proses pengiriman informasi.

d) Perubahan dalam aturan atau pola-pola, banyak aturan atau pola-pola hubungan yang mengalami perubahan seiring perkembangan masyarakat. Emansipasi perempuan dalam dunia kerja misalnya,

telah mengubah cara pandang masyarakat dalam menyikapi perempuan yang pulang malam, yang tidak selalu dikonotasikan sebagai perempuan nakal karena tidak semua perempuan yang pulang malam adalah perempuan nakal tetapi banyak juga karena pulang kerja sebagai perempuan yang berkarier

c. Teori Perubahan Sosial

Menurut Martono (2012: 34) secara makro perubahan sosial dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok pemikiran, yaitu kelompok teori yang dikategorikan dalam teori evolusi, teori siklus, teori fungsional, dan teori konflik.

1) Teori Evolusi

Menurut James M. Henslin (2007), terdapat dua tipe teori evolusi mengenai cara masyarakat berubah, yakni teori unilinier dan teori multilinier :

Pandangan teori unilinier mengamsusikan bahwa semua masyarakat mengikuti jalur evolusi yang sama. Setiap masyarakat berasal dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks (sempurna), dan masing-masing melewati proses perkembangan yang seragam. Salah satu dari teori ini yang pernah mendominasi pemikiran

Barat adalah teori evolusi dari Lewis Morgan, yang menyatakan bahwa semua masyarakat berkembang melalui tiga tahap: kebuasan, barbarisme, dan peradaban.

Pandangan teori multilinier menggantikan teori unilinier dengan tidak mengamsusikan bahwa semua masyarakat mengikuti urutan yang sama, artinya meskipun jalurnya mengarah ke industrialisasi, masyarakat tidak perlu melewati urutan tahapan yang sama seperti masyarakat yang lain.

2) Teori Siklus

Pitirim Sorokin (dalam Jehanih, 2007 :3) berpandangan bahwa semua peradaban besar berada dalam siklus tiga sistem kebudayaan yang berputar tanpa akhir, yang meliputi : (a) kebudayaan ideasional (ideational cultural) yang didasari oleh nilai-nilai dan kepercayaan terhadap unsur adikodrati (super natural); (b) kebudayaan idealistis (idealistic culture) di mana kepercayaan terhadap unsur adikodrati dan rasionalitas yang berdasarkan fakta bergabung dalam menciptakan masyarakat ideal; dan (c) kebudayaan inderawi dimana dunia nyata adalah realitas dan nilai tertinggi dan satu-satunya kenyataan yang ada.

Menurut Horton dan Hunt (1992) teori ini melihat bahwa ada sejumlah tahap yang harus dilalui setiap masyarakat, namun mereka berpandangan bahwa proses peralihan tersebut bukanlah akhir dari proses perubahan yang sempurna. Akan tetapi, proses peralihan

tersebut akan kembali ke tahap semula untuk kembali mengalami peralihan.

3) Teori Fungsionalis

Penganut teori ini memandang setiap elemen masyarakat memberikan fungsi terhadap elemen masyarakat lainnya. Perubahan yang muncul di suatu bagian masyarakat akan menimbulkan perubahan pada bagian yang lain pula. Perubahan dianggap mengacaukan keseimbangan masyarakat. Proses pengacauan itu berhenti pada saat perubahan tersebut telah diintegrasikan ke dalam kebudayaan (menjadi cara hidup masyarakat).

Oleh sebab itu menurut teori ini unsur kebudayaan baru yang memiliki fungsi bagi masyarakat akan diterima, sebaliknya yang disfungsional akan ditolak.

4) Teori Konflik

Menurut pengikut teori ini, yang konstan (tetap terjadi) dalam kehidupan masyarakat adalah konflik sosial, bukannya perubahan. Perubahan hanyalah merupakan akibat dari adanya konflik dalam masyarakat, yakni terjadinya pertentangan antara kelas kelompok penguasa dan kelas kelompok tertindas. Oleh karena konflik sosial berlangsung secara terus menerus, maka perubahan pun juga demikian adanya.

d. Bentuk-Bentuk Perubahan Sosial

Soekanto (1999:345) menyebutkan bahwa bentuk-bentuk perubahan sosial dapat dikategorikan sebagai berikut :

1) Perubahan Sosial Secara Lambat

Perubahan sosial secara lambat dikenal dengan istilah evolusi, merupakan perubahan-perubahan yang memerlukan waktu lama, dan rentetan-rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti. Ciri perubahan secara evolusi ini seakan perubahan itu tidak terjadi di masyarakat, berlangsung secara lambat dan umumnya tidak mengakibatkan disintegrasi kehidupan.

Perubahan secara lambat terjadi karena masyarakat berusaha menyesuaikan diri dengan keperluan, keadaan dan kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Oleh sebab itu perubahan yang terjadi melalui evolusi terjadi dengan sendirinya secara alami, tanpa rencana atau kehendak tertentu.

2) Perubahan Sosial Secara Cepat

Perubahan sosial yang berjalan cepat disebut revolusi. Selain terjadi secara cepat, juga menyangkut hal-hal yang mendasar bagi kehidupan masyarakat serta lembaga-lembaga kemasyarakatan, dan sering menimbulkan disintegrasi dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik.

3) Perubahan Sosial Kecil

Perubahan sosial kecil merupakan perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung / berarti bagi masyarakat karena tidak berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan dan lembaga kemasyarakatan.

4) Perubahan Sosial Besar

Perubahan sosial besar merupakan perubahan yang dapat membawa pengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan serta menimbulkan perubahan pada lembaga kemasyarakatan seperti yang terjadi pada masyarakat yang mengalami proses modernisasi – industrialisasi.

5) Perubahan Sosial yang Direncanakan

Perubahan Sosial yang dikehendaki atau direncanakan merupakan perubahan yang diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang akan mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Pihak-pihak yang menghendaki perubahan dinamakan Agent of change (agen perubahan), yaitu seseorang atau sekelompok orang yang

telah mendapat kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin dari satu atau lebih lembaga - lembaga kemasyarakatan, serta memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial.

6) Perubahan Sosial yang Tidak Direncanakan

Perubahan sosial yang tidak direncanakan (tidak dikehendaki) merupakan perubahan yang berlangsung tanpa direncanakan / dikehendaki oleh masyarakat dan di luar jangkauan pengawasan masyarakat.

Konsep perubahan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki tidak mencakup pengertian apakah perubahan-perubahan tadi diharapkan atau tidak diharapkan oleh masyarakat. Karena bisa terjadi, perubahan yang tidak direncanakan/tidak dikehendaki ternyata diharapkan dan diterima oleh masyarakat, seperti reformasi yang terjadi di Indonesia.

e. Faktor-Faktor Perubahan Sosial

1) Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perubahan Sosial

Soekanto (1999: 352) mengungkapkan secara umum faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu penyebab dari dalam (Faktor Internal) dan penyebab dari luar (Faktor Eksternal).

a) Faktor Internal

1. Bertambah atau Berkurangnya Penduduk

Pertambahan penduduk yang sangat cepat di Pulau Jawa menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur masyarakat, terutama lembaga-lembaga kemasyarakatannya.

Berkurangnya penduduk mungkin disebabkan berpindahnya penduduk dari desa ke kota atau dari daerah ke daerah lain (misalnya transmigrasi). Perpindahan penduduk menyebabkan kekosongan, misalnya, dalam bidang pembagian kerja dan stratifikasi sosial yang mempengaruhi lembaga-lembaga kemasyarakatan.

2. Penemuan-Penemuan Baru

Penemuan-penemuan baru dibedakan dalam pengertian *discovery* dan *invention*. *Discovery* adalah penemuan unsur kebudayaan yang baru, baik berupa alat, ataupun yang berupa gagasan yang diciptakan oleh seorang individu atau serangkaian ciptaan para individu. *Discovery* baru menjadi *invention* apabila masyarakat sudah mengakui, menerima serta menerapkan / menggunakan penemuan baru tersebut; misalnya dalam proses penemuan mobil.

Rangkaian proses penemuan, pengembangan dan persebaran suatu hasil kebudayaan baru tersebut, serta cara-cara unsur kebudayaan baru tadi diterima, dipelajari dan akhirnya dipakai dalam masyarakat, dinamakan sebagai *innovation* (inovasi).

3. Pertentangan

Pertentangan yang terjadi antara individu dengan kelompok maupun antara kelompok dengan kelompok dapat menjadi penyebab terjadinya perubahan sosial masyarakatnya. Seperti yang sering terjadi pada masyarakat yang tengah mengalami pergeseran dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern, pertentangan terjadi antara kelompok generasi tua dengan kelompok generasi muda yang lebih cepat menerima unsur-unsur kebudayaan modern.

4. Terjadinya Pemberontakan Atau Revolusi

Terjadinya pemberontakan atau Revolusi dalam suatu pemerintahan negara akan menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan besar dalam kehidupan negara tersebut. Seluruh lembaga kemasyarakatan, mulai dari bentuk negara sampai turunan-turunannya pun mengalami perubahan-perubahan yang mendasar.

b) Faktor Eksternal

1. Lingkungan Alam Fisik Sekitar

Perubahan yang berkaitan dengan lingkungan alam fisik biasanya disebabkan oleh bencana alam, seperti banjir bandang, gempa bumi, tanah longsor dan gunung meletus.

Kondisi ini mengakibatkan penduduk harus pindah ke daerah yang lebih aman dan berbeda dengan kondisi

lingkungan yang lama. Untuk menyesuaikan dengan kondisi lingkungan di daerah baru, maka berkembanglah lembaga-lembaga kemasyarakatan baru untuk menjaga agar kehidupan masyarakat tetap dapat berjalan.

2. Peperangan

Peperangan dapat mengakibatkan perubahan sosial pada masyarakatnya, bagi negara yang menelan kekalahan. Karena biasanya negara yang menang akan memaksakan kebudayaannya pada negara yang kalah.

3. Pengaruh Kebudayaan Masyarakat Lain

Masuknya pengaruh kebudayaan masyarakat lain bisa terjadi karena adanya hubungan fisik antara dua masyarakat, yang diikuti adanya pengaruh timbal balik sehingga masing-masing masyarakat akan mengalami perubahan.

2) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Perubahan

a) Faktor-Faktor Yang Mendorong Proses Perubahan

Soekanto (1999: 361) mengatakan bahwa ada faktor-faktor yang mendorong proses perubahan sosial itu sendiri, antara lain adalah :

1. Kontak dengan kebudayaan lain

Masyarakat yang mengalami kontak dengan kebudayaan lain cenderung akan terpengaruh oleh kebudayaan tersebut sehingga menghasilkan perubahan dalam kehidupan masyarakatnya. Proses tersebut berlangsung melalui difusi atau

proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan ke individu atau masyarakat lain.

2. Sistem pendidikan formal yang maju

Pendidikan mengajarkan pada individu aneka macam kemampuan. Pendidikan memberikan nilai-nilai tertentu bagi manusia, terutama dalam membuka pikirannya agar berpikir secara ilmiah dan obyektif. Sehingga tumbuh kemampuan untuk menilai dan menaksir apakah kebudayaan masyarakatnya akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan zaman atau tidak.

3. Sikap menghargai karya dan keinginan untuk maju

Apresiasi terhadap hasil karya anggota masyarakatnya merupakan indikasi bahwa masyarakat tersebut ingin maju lewat karya-karya baru warganya. Hal ini dapat menjadi pendorong bagi anggota masyarakat lainnya untuk menghasilkan penemuan-penemuan baru.

4. Toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang, yang bukan merupakan delik

Adanya sikap toleransi terhadap penyimpangan yang terjadi di masyarakat dalam bentuk penyimpangan dari kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakatnya (akan tetapi bukan penyimpangan dalam arti delik/pelanggaran hukum) menyebabkan masyarakat memiliki keberanian untuk melakukan hal-hal yang menyimpang/berbeda dari kebiasaan-

kebiasaan yang ada, sehingga terjadi perubahan di dalam kehidupan masyarakatnya.

5. Sistem lapisan masyarakat yang terbuka

Sistem pelapisan masyarakat yang terbuka merupakan sistem yang memberikan peluang atau kesempatan kepada setiap warga masyarakat untuk mengalami mobilitas sosial vertikal secara luas, dimana setiap warga masyarakat memiliki kesempatan untuk meraih prestasi dan memiliki kedudukan/status sosial yang lebih tinggi.

6. Penduduk yang heterogen

Di dalam masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial yang mempunyai perbedaan latar belakang kebudayaan, ras, ideologi dan sebagainya, mempermudah terjadinya konflik-konflik dalam masyarakat, sehingga sering muncul goncangan-goncangan yang mendorong terjadinya perubahan kehidupan masyarakat.

7. Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu.

Ketidakpuasan yang berlangsung terlalu lama dalam sebuah masyarakat kemungkinan besar akan mendatangkan revolusi.

8. Orientasi ke masa depan

Masyarakat yang mampu berfikir ke arah masa depan (memiliki Visi, Misi dan tujuan hidup yang jelas) akan

terdorong untuk mewujudkan cita-cita masa depannya, sehingga tumbuh sebagai masyarakat yang dinamis, kreatif, yaitu masyarakat yang selalu berusaha menghasilkan penemuan-penemuan baru yang akan merubah kehidupan masyarakatnya menuju terwujudnya masyarakat yang dicita-citakan.

9. Stigma bahwa manusia harus senantiasa memperbaiki hidupnya

Berkembangnya keyakinan terhadap nilai-nilai hakekat hidup di mana manusia agar bisa tetap eksis harus berusaha memperbaiki hidupnya, menjadi pendorong masyarakat untuk selalu berusaha meningkatkan kualitas hidupnya dengan berusaha merubah kondisi hidupnya ke arah yang lebih baik.

b) Faktor Penghambat Perubahan Sosial

Menurut Soekanto (1999: 365) selain ada faktor yang mendorong terjadinya perubahan sosial, ada juga faktor yang menghambat proses perubahan sosial tersebut, antara lain adalah :

1. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain

Kehidupan terasing menyebabkan sebuah masyarakat tidak mengetahui perkembangan-perkembangan apa yang terjadi pada masyarakat lain. Sehingga menyebabkan masyarakatnya terkungkung pola-pola pemikirannya oleh tradisi.

2. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat

Kondisi masyarakat yang terlambat ilmu pengetahuannya dapat dijumpai pada masyarakat yang pernah terjajah lama oleh masyarakat atau bangsa lain. Selain itu bisa juga terjadi pada masyarakat yang terasing atau tertutup. Kondisi tersebut melahirkan masyarakat yang statis, dan tidak mampu berkembang karena keterbatasan ilmu pengetahuannya.

3. Sikap masyarakat yang sangat tradisional

Sikap masyarakat yang suka mengagung-agungkan tradisi dan masa lampau, serta anggapan bahwa tradisi secara mutlak tidak dapat dirubah, akan menjadi penghambat jalannya proses perubahan, karena masyarakat dihinggapi rasa takut atau menganggap tabu untuk meninggalkan dan merubah tradisi lama dengan tradisi yang baru.

4. Adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat atau vested interests

Dalam setiap masyarakat terdapat sistem pelapisan sosial yang memposisikan sekelompok orang untuk menikmati kedudukan sosial pada lapisan atas. Hal ini sering terjadi pada masyarakat feodal dan masyarakat yang tengah mengalami transisi. Mereka yang memiliki kedudukan pada lapisan atas, akan selalu mempertahankan posisi tersebut dan sukar sekali untuk mau melepaskan kedudukannya.

5. Rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan

Setiap masyarakat memiliki unsur-unsur budaya yang dipandang menjadi dasar integrasi bagi keberlangsungan hidup masyarakat yang harmonis. Oleh sebab itu masyarakat berusaha memelihara dan mempertahankannya agar keharmonisan tetap terjaga. Masuknya unsur-unsur budaya luar sering disikapi dengan kekhawatiran dapat menyebabkan terjadinya perubahan pada unsur-unsur kebudayaan tersebut dan menggoyahkan integrasi masyarakatnya, sehingga cenderung ditolak.

6. Prasangka terhadap hal-hal baru atau asing atau sikap yang tertutup

Bagi masyarakat yang pernah dijajah oleh bangsa-bangsa Barat, prasangka - prasangka negatif serta sikap yang tertutup tersebut masih sering melekat dengan kuat, karena tidak bisa melupakan pengalaman-pengalaman pahit yang pernah mereka terima selama dijajah. Karena saat ini hal-hal baru umumnya datang dari dunia Barat, maka oleh masyarakat disikapi dengan prasangka sebagai upaya untuk melakukan penjajahan kembali. Oleh sebab itu masuknya hal-hal baru cenderung ditolak oleh masyarakat.

7. Hambatan-hambatan yang bersifat ideologis

Setiap bangsa atau masyarakat tentu memiliki ideologi yang mengandung nilai - nilai dasar sebagai pedoman dalam hidup bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Oleh sebab itu nilai-nilai ideologi merupakan nilai universal yang berfungsi sebagai alat pemersatu / integrasi dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat tersebut. Masuknya unsur budaya baru yang dianggap tidak sesuai apalagi bertentangan dengan nilai-nilai ideology tersebut, cenderung akan ditolak karena dikhawatirkan dapat mengganggu kestabilan dan integrasi dalam kehidupan mereka.

8. Adat atau kebiasaan

Adat atau kebiasaan yang hidup di masyarakat merupakan pola - pola perilaku bagi anggota masyarakat dalam memenuhi segala kebutuhan pokoknya. Ada kalanya adat atau kebiasaan tersebut begitu kokoh teranam dalam kehidupan masyarakatnya, sehingga sulit untuk diubah, seperti yang berkaitan dengan bidang kepercayaan, sistem mata pencaharian, pembuatan rumah, cara berpakaian tertentu dan sebagainya.

9. Nilai bahwa hidup ini pada hakikatnya buruk atau tidak mungkin diperbaiki

Berkembangnya nilai-nilai tersebut di dalam masyarakat akan melahirkan sikap hidup yang apatis. Mereka meyakini bahwa kehidupan di dunia memang penuh dengan kesusahan dan kesulitan yang dipahami sebagai kodrat yang harus diterima dan dijalannya, karena kehidupan tidak mungkin diubah dan diperbaiki.

2. Pembentukan Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan.

Menurut Wijaya (2003: 3) desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan menurut Bintarto yang meninjau dari aspek geografis mengemukakan bahwa desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain.

Sementara menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa desa merupakan suatu kesatuan dari masyarakat hukum, yang memiliki kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri, sesuai dengan kondisi, adat, dan sosial budaya setempat.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru di luar desa yang sudah ada. Pembentukan desa baru ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

Menurut Mardiansyah dalam (Putra, 2019:26) pemekaran yakni suatu pembagian suatu wilayah menjadi dua wilayah atau lebih yang dilakuakn pemerintah daerah atau provinsi untuk mencapai tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Halim dalam (Lusida, 2017: 29) pemekaran wilayah pada dasarnya memiliki tiga arti penting dalam konteks pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik.

- 1) Pemekaran akan lebih ideal jika didasarkan pada kerangka pemberdayaan masyarakat lokal. Hal ini disebabkan karena sebagai konsekuensi otonomi daerah, semakin banyak daerah/wilayah baru dibentuk akan semakin banyak wilayah otonom yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

- 2) Pemekaran wilayah memperkecil *span of control* seseorang kepada daerah tetapi strategi masyarakat karena dikemungkinan untuk melakukan *feed back control* terhadap kebijakan diwilayahnya.
- 3) Pemekaran wilayah adalah salah satu cara untuk merebut dana yang diperuntukkan untuk wilayah baru. Selain itu, pemekaran memiliki arti penting terhadap penguasaan hak atas tanah, sumber daya alam, keberlangsungan adat istiadat, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Menurut Efendi dalam (Lusida, 2017:29) upaya pemekaran wilayah dipandang sebagai sebagai terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan akses pelayanan bagi masyarakat, serta pemerintah untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang keadilan pemerintah, sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan, memperpendek rentang kendali pemerintah serta pemerataan pembangunan.

Setiawan (dalam Lusida, 2017: 29-30) mengatakan bahwa pembentukan desa akan berdampak pada infrstruktur, dan pembangunan infrastruktur desa akan berdampak positif terhadap wilayah tersebut. Pertama, rentang kendali pelayanan pemerintah menjadi mudah terjangkau. Kedua, peningkatan pembangunan ekonomi dengan penurunan tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan tingkat kesehatan gizi buruk. Ketiga, peningkatan

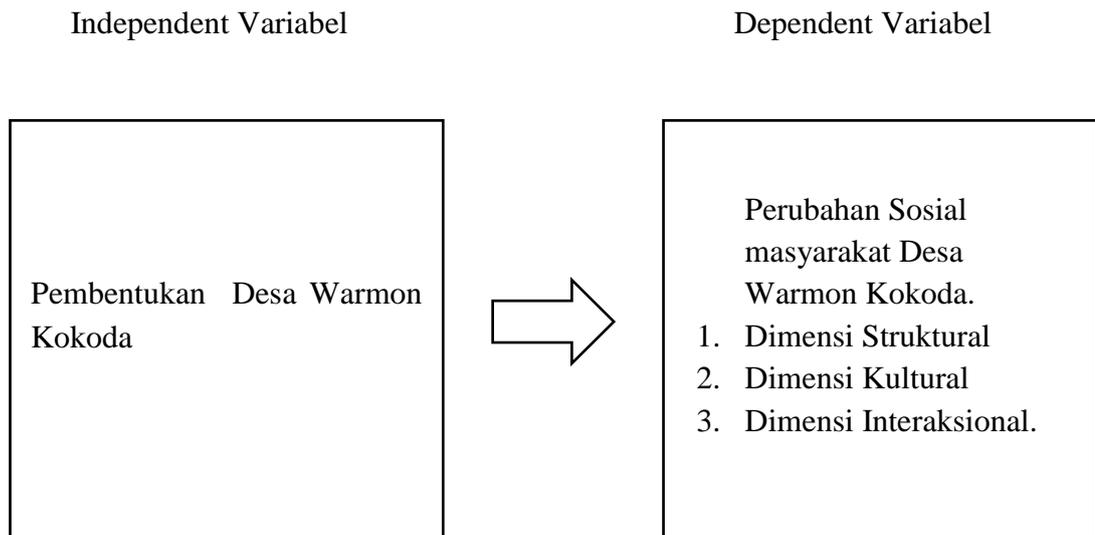
kesejahteraan. Keempat, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kelima, Pemahaman pendidikan politik.

Dengan demikian pembentukan desa baru atau pemekaran adalah wujud pengejawantahan serapan aspirasi yang berkembang di masyarakat, yang idealnya dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam sebuah meningkatkan kemampuan pemerintah desa, memperpendek rentang kendali, sehingga efektifitas penyelenggaraan pemerintah yang hirarki serta pengelolaan pembangunan dapat terwujud.

F. Kerangka Pikir

Gambar 1.1

Kerangka Pikir



G. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan suatu upaya untuk membatasi pengertian antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penerapan teori. Adapun definisi konseptual yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Sosial

Perubahan sosial merupakan segala bentuk perubahan-perubahan dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan pada suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk dalam nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Perubahan sosial memiliki dimensi-dimensi, yaitu dimensi struktural, dimensi kultural, serta dimensi interaksional.

Proses perubahan sosial tentunya tidak dapat berjalan tanpa suatu penyebab, oleh karenanya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial itu sendiri, baik dari faktor internal ataupun faktor eksternal. Selain itu proses perubahan sosial juga mempunyai bentuk-bentuk yang bermacam-macam. Ada perubahan yang berlangsung secara cepat, ada yang lambat, perubahan sosial besar, perubahan sosial kecil, perubahan sosial yang direncanakan, serta perubahan yang tidak direncanakan.

2. Pembentukan Desa

Pembentukan desa baru atau pemekaran adalah wujud pengejawantahan serapan aspirasi yang berkembang di masyarakat, yang idealnya dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam sebuah meningkatkan kemampuan pemerintah desa, memperpendek rentang kendali, sehingga efektifitas penyelenggaraan pemerintah yang hirarki serta pengelolaan pembangunan dapat terwujud.

H. Definisi Operasional

Untuk mengkaji proses perubahan yang terjadi di masyarakat Kampung Warmon Kokoda penulis menggunakan teori Himes dan Moore (dalam Soelaiman, 1998) yang melihat perubahan sosial dari beberapa dimensi, yaitu dimensi struktural, dimensi kultural, dan dimensi interaksional.

Perubahan Sosial Masyarakat Desa Warmon Kokoda :

- a) Dimensi Struktural
 - 1) Pendidikan
 - 2) Mata Pencaharian
 - 3) Jumlah Penduduk
 - 4) Struktur Kelembagaan
 - 5) Status dan Peran
- b) Dimensi Kultural
 - 1) Gaya Hidup
 - 2) Pola Pikir
 - 3) Budaya Masyarakat Warmon Kokoda
- c) Dimensi Interaksional
 - 1) Interaksi Antar Masyarakat Desa Warmon Kokoda
 - 2) Interaksi Dengan Warga Transmigran Jawa

I. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian, metodologi sangat berperan penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian dengan kata lain setiap penelitian, peneliti dituntut untuk harus berfikir sistematis agar dapat mempertanggungjawabkan penelitiannya secara ilmiah. Metodologi merupakan pengetahuan tentang berbagai cara, yaitu dari kerja untuk memahami obyek-obyek yang menjadi sasaran dari pada ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2000:3) penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Sementara menurut Salim dalam (Dwiyoga, 2018: 30) menyatakan bahwa penelitian kualitatif memiliki karakteristik yaitu: 1) data penelitian diperoleh secara langsung dari lapangan, bukan dari laboratorium atau penelitian yang terkontrol; 2) data digali dengan cara alamiah; dan 3) untuk memperoleh makna baru dalam bentuk kategori-kategori jawaban, peneliti memiliki kewajiban untuk mengembangkan situasi dialogis sebagai situasi ilmiah.

2. Unit Analisa

a) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah penelitian yang akan dilakukan. Adapun lokasi penelitiannya yaitu di Desa Warmon Kokoda, Kecamatan Mayamuk, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. Desa Warmon Kokoda merupakan lokasi KKN peneliti pada tahun 2017.

b) Aktor atau Pelaku

Pelaku yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Masyarakat Desa Warmon Kokoda, Kecamatan Mayamuk, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat.

c) Aktivitas

Komponen aktivitas dalam penelitian ini berkaitan dengan perubahan sosial masyarakat Desa Warmon Kokoda Pasca Pembentukan Desa baru. Adapun aktivitas yang diamati adalah perubahan-perubahan

dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan pada masyarakat Desa Warmon Kokoda yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk dalam nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

d) Jenis Data

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber melalui wawancara dan observasi. Informan atau orang yang diwawancarai adalah orang yang dalam penelitian ini dipilih dengan harapan dapat memberikan keterangan yang diperlukan untuk melengkapi atau memperjelas jawaban dari responden.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada :

1. Kepala Desa Warmon Kokoda
2. RT di Desa Warmon Kokoda
3. Kepala RW Makbusun yang menaungi Desa Warmon Kokoda sebelum terbentuk menjadi Desa
4. Bapak Raja di Warmon Kokoda
5. MPM Muhammadiyah Pusat
6. Kepala Sekolah Labschool Warmon Kokoda

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah semua informasi yang diperoleh tidak secara langsung, dari dokumen-dokumen yang pernah mengkaji tentang obyek penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam penelitian ini peneliti

mengumpulkan data dari buku, jurnal, koran, dokumentasi mengenai kajian wilayah terkait.

e) Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan upaya untuk memperoleh bahan keterangan yang sebenarnya dan dapat dipertanggung jawabkan. Dilihat dari cara atau teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, kuesioner, dokumentasi, dan kepustakaan. Namun dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, serta dokumentasi.

1) Observasi

Observasi merupakan metode ilmiah, observasi biasa diartikan sebagai pengamatan terhadap fenomena-fenomena serta kejadian-kejadian yang diamati. Dalam penelitian ini peneliti mengamati perubahan sosial masyarakat Desa Warmon Kokoda pasca pembentukan desa baru.

Observasi dikategorikan menjadi 2 macam, yaitu :

- a. Observasi Partisipasi, merupakan pengamatan yang dilakukan dengan keterlibatan peneliti di dalam situasi yang melingkupi unit analisa penelitian.
- b. Observasi Non-Partisipasi, merupakan pengamatan yang dilakukan dengan tanpa adanya keterlibatan penelitian di dalam situasi yang melingkupi unit analisa penelitian.

2) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan percakapan langsung untuk mendapatkan informasi dari informan atau responden. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face) maupun dengan menggunakan telepon.

3) Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode dengan mencari data tentang hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Metode ini adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan objek penelitian.

f) Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman (2014) yang menyatakan bahwa ada 3 macam analisis data model interaktif yang dapat digunakan, yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

1) Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi.

2) Penyajian Data

Penyajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinannya penarikan simpulan serta memberikan tindakan.

3) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyusun pencatatan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi.